

PENGGUNAAN ANALISIS JARINGAN SOSIAL UNTUK MENGIDENTIFIKASI PENGARUH PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TATA KELOLA PASAR TRADISIONAL DI KOTA TANGERANG SELATAN, INDONESIA

Pitri Yandri¹, Suparman²

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Email : ¹pitriyandri@stiead.ac.id, ²suparmankadamin@gmail.com

Keyword :

stakeholder, policy,
eigenvector centrality,
market rente

Abstract. The problem of the less quality of traditional market seems to be sourced from the governance issues. It is indicated by the large number of stakeholders involved, both formal and informal actors. The object of this research is traditional market at Tangerang Selatan, Indonesia. The large number of stakeholders involved have an impact on the complexity of the problems encountered and difficulties of the making of appropriate policy solutions on whom the most responsible actor for the question. Based on the issue this article attempts to investigate the involved actors in governance network its traditional market and examining the most actors who play a role in the network. The results show that there are 13 actors who involved: local authority in commerce, local authority in transportation, local authority in environment, retribution officer, person of police/TNI, person of legislative, "kios/lapak" user, security guard, gangsters, local people, parking officer, streetfood/PKL, and private market manager.

Kata kunci :

stakeholder, kebijakan,
eigenvector centrality,
rente pasar

Abstrak. Persoalan rendahnya mutu pasar tradisional tampaknya bersumber dari persoalan tata kelola. Hal tersebut diindikasikan oleh banyaknya para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat, baik formal maupun nonformal. Penelitian ini dilakukan dengan obyek pasar tradisional di kota Tangerang Selatan, Indonesia. Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat berdampak pada kompleksitas masalah yang dihadapi dan kesulitan pengambilan solusi kebijakan yang tepat tentang siapa aktor yang paling bertanggungjawab atas persoalan pasar tradisional. Atas dasar masalah tersebut, artikel ini berupaya menginvestigasi aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola pasar tradisional beserta jaringannya dan menguji siapa aktor yang paling berperan dalam jaringan tersebut. Hasil investigasi menunjukkan, terdapat 13 aktor yang terlibat antara lain: dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perhubungan, dinas kebersihan, petugas parkir, oknum polisi/TNI, oknum anggota DPR/DPRD, pengguna kios/lapak, satpam, preman, warga sekitar, petugas parkir, PKL, dan pengelola pasar.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan pasar tradisional di Indonesia tampaknya masih berkulat pada problem yang itu-itu saja. Sejumlah problem yang tercatat misalnya: ketidaktertiban pedagang (semrawut), tata kelola limbah/sampah pasar yang lemah, infrastruktur bangunan pasar yang tua, dan seterusnya. Membandingnya dengan pasar modern, kualitas pasar tradisional sangat jauh tertinggal. Dari 21 indikator persaingan bauran pemasaran, sebanyak 76% dikuasai oleh pasar modern (Purwanto, 2012). Selain itu, studi yang dilakukan Sadino dan Syahbana (2014) misalnya menyimpulkan, keunggulan pasar modern dibanding pasar tradisional terletak pada atribut keragaman, kualitas barang, kenyamanan, promosi serta lokasi. Membaca situasi demikian, masalah pasar tradisional sebenarnya memang bersumber dari tubuh internalnya sendiri (Suryadarma, 2007).

Dari perspektif desentralisasi, pasar tradisional merupakan kekayaan daerah di mana penggunaannya diwajibkan membayar sejumlah retribusi. Jika dilihat dari perspektif desentralisasi, silang-sengkarut masalah yang dihadapi pasar tradisional berdampak nyata terhadap makroekonomi daerah. Gejala rendahnya penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu bukti nyata bahwa pasar tradisional belum mampu menjadi penyumbang signifikan bagi PAD. Hasil studi tentang hal ini dapat terbaca dalam artikel yang ditulis Megawati dan Soejoto (2016); Marselina (2013); dan Handoko (2012).

Atas dasar masalah tersebut, sejumlah akademisi kemudian menyarankan perlunya menyusun strategi dan mengambil kebijakan yang lebih berdampak pasti terhadap perbaikan kondisi pasar tradisional. Dalam kaitan itu, Martini et al (2016), Sukaatmadja (2014), dan Istiningtyas (2008) merekomendasikan

beberapa kebijakan yang penting dilakukan dalam upaya menyelesaikan problem silang-sengkarut tersebut. Martini et al (2016) misalnya menyerukan perlunya revitalisasi pasar dengan menjaga keamanan pasar agar dapat kondusif. Saran yang diberikan adalah strategi pertumbuhan, baik dengan cara integrasi vertikal, penetrasi pasar, dan pengembangan produk. Saran kebijakan revitalisasi terhadap pasar tradisional juga ditulis dalam artikel Pradipta dan Wirawan (2016), Prastyawan et al (2015), Holidin dan Andini (2014) dan Febrianty (2013).

Namun demikian, hasil studi kebijakan revitalisasi terhadap pasar tradisional masih sangat bervariasi. Di satu sisi, studi yang dilakukan Alfianita et al (2015) menyimpulkan bahwa kebijakan revitalisasi pasar berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Tetapi di sisi yang lain, studi yang dilakukan Asma (2016) misalnya menyatakan bahwa kebijakan revitalisasi dipandang belum efektif dalam upaya mendorong agar pasar tradisional menjadi lebih baik. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh lemahnya penegakkan aturan.

Sementara Sukaatmadja (2014), dengan menggunakan analisis SWOT, saran pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan mereduksi kelemahan yang terdapat dalam pasar tradisional, yaitu: penyediaan sarana parkir, pembaharuan metode transaksi, penertiban lapak zonasi, tata kelola limbah/sampah pasar, penyediaan fasilitas umum, dan pelayanan konsumen. Di lain sisi, Istiningtyas (2008) menyarankan -salah satunya- agar perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar secara profesional. Akademisi lain menyarankan penerapan kebijakan pengaturan zonasi antara pasar tradisional dan pasar modern (Noor, 2013; Kupita dan Bintoro, 2012; Bintoro, 2010), walau dalam hal tertentu

kemunduran pasar tradisional bukan disebabkan keberadaan pasar/ritel modern (Suryadarma et al, 2010).

Pendek kata, seluruh tawaran kebijakan para akademisi terhadap perbaikan mutu pasar tradisional terletak pada pengelolaan yang baik (good governance). Terminologi governance sendiri banyak digunakan untuk konteks yang berbeda-beda. Rhodes (1997) misalnya menunjuk governance sebagai jaringan kebijakan (policy networks), Hood (1990) menyebutnya sebagai manajemen publik (public management), Cambell et al., (1991) menyebutnya sebagai koordinasi antarsektor ekonomi, Pierre (1998) mengatakannya sebagai kemitraan publik-privat. Dalam konteks yang lain, Williamson (1999) menyebut corporate governance dan good govenance yang acapkali menjadi syarat utama yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga donor asing (Lefwich, 1994).

Namun demikian, Ostrom (1994) memberikan konteks yang lebih luas. Dia mengartikan governance sebagai "suatu cara masyarakat secara menyeluruh mengelola masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial". Definisi terbaru governance diberikan oleh Bank Dunia, yang definisi itu tercantum dalam laporan tahunan mereka (World Development Report), di mana mereka mendefinisikan governance sebagai "the process through which state and nonstate actors interact to design and implement policies within a given set of formal and informal rules that

shape and are shaped by power (proses di mana aktor negara (state actor) dan aktor nonnegara (non-state actor) mendesain dan mengimplementasi kebijakan dalam sekumpulan aturan formal dan informal yang membentuk dan dibentuk oleh kewenangan/kekuasaan (power)" (World Bank, 2017).

Karena itu, dalam konteks kebijakan publik, proses pembuatannya tidak terjadi di ruang hampa udara, melainkan hasil dari proses tawar-menawar antaraktor yang sering memiliki beragam preferensi dan kepentingan. Yang lebih penting, tawar-menawar beragam antaraktor itu adalah hasil dari beragam sumber seperti keberadaan peraturan formal, normal-norma informal, kemampuan para aktor tersebut dalam memobilisasi kelompok mereka atau kontrol mereka terhadap berbagai sumberdaya yang ada. Proses kompleks di antara aktor-aktor tersebut dalam mendesain dan mengimplementasi kebijakan pada konteks sosial, politik dan ekonomi itulah yang disebut sebagai governance. Untuk menghasilkan sebuah governance yang baik adalah: komitmen terpercaya (credible commitment), koordinasi dan kerjasama (cooperation) (World Bank, 2017). Berikut ini adalah tiga prinsip kunci untuk memahami governance dalam pembangunan (World Bank, 2017).

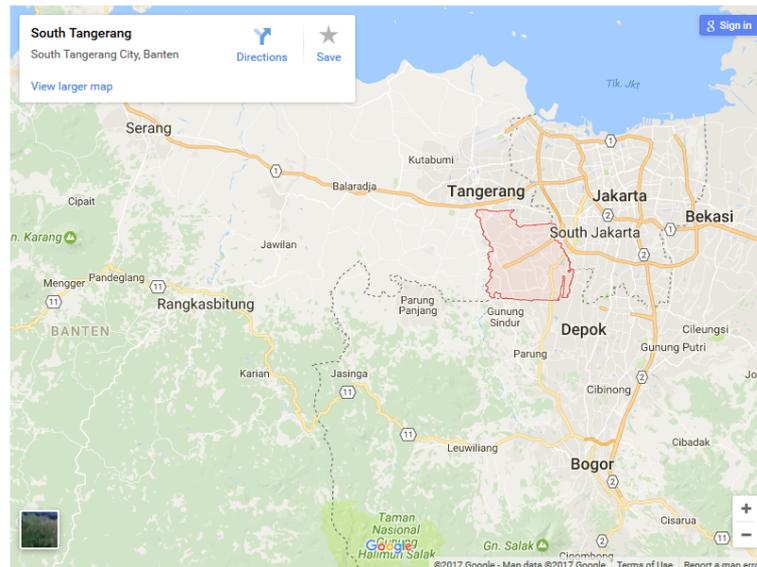
Tabel 1.

Tiga Prinsip Pemahaman Kunci Governance dalam Pembangunan

| Pendekatan Tradisional | Prinsip Pemikiran Ulang dalam Governance |
|---|--|
| Investasi pada mendesain bentuk yang benar dalam kelembagaan. | Berfokus pada tidak hanya pada bentuk, tetapi juga fungsi mereka. |
| Membangun kapasitas kelembagaan utk mengimplementasi kebijakan. | Berfokus pada tidak hanya membangun kapasitas, tetapi juga kekuasaan/kewenangan asimetris. |

Fokus pada penguatan aturan hukum (*rule of law*) Berfokus pada tidak hanya aturan hukum, tetapi untuk memastikan kebijakan dan aturan juga peran dari hukum tersebut (*role of law*). diaplikasi secara impersonal.

Sumber: World Bank, 2017



Gambar 1. Peta Lokasi Kota Tangerang Selatan

Apa yang direkomendasikan sejumlah akademisi terhadap perbaikan pasar tradisional tidak lain dan tidak bukan menyangkut mutu kelembagaan yang didukung oleh komitmen, koordinasi dan kooperasi yang baik dari pemerintah daerah dalam menyusun desain tata kelola pasar tradisional yang modern, berdaya saing dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Membuat pasar tradisional lebih modern berarti memberi kepastian pada upaya pelestarian pasar tradisional sebagai rumah budaya (Basri et al, 2012), dan dalam hal tertentu berperan sebagai 'lembaga' yang bisa mereduksi konflik horizontal (Sudarmo, 2016); dan karenanya, eksistensi mereka menjadi penting dalam konstelasi roda perekonomian (Putra & Rudito, 2015), terutama roda perekonomian daerah. Apalagi dalam konteks daerah suburban yang banyak berdiri ritel minimarket secara massif (Smadja dan Torre, 2017), mempertahankan keberadaan pasar tradisional dengan demikian menjadi

kebijakan publik yang tak dapat ditawarkan lagi (Suryadarma et al, 2010).

Sealir dengan hal tersebut, Kota Tangerang Selatan sebagai daerah suburban (Gambar 1) memiliki sembilan pasar tradisional yaitu: Pasar Ciputat, Pasar Serpong, Pasar Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Jengkol, Pasar Gedung Hijau, Pasar Kita Pamulang, dan Pasar Gintung (Yandri, 2013). Sebagai daerah otonom baru yang didirikan melalui UU. No. 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, infrastruktur (aset) pasar tradisional baru diserahkan dari kabupaten induk 6-7 tahun setelah wilayah ini resmi berdiri. Persoalan kelambanan pelimpahan hak kepemilikan aset itulah yang menyebabkan seluruh pasar tersebut masih dalam kondisi yang memprihatinkan hingga saat ini. Pengamatan terhadap kondisi fisik pasar menunjukkan, permasalahan pasar di Tangerang Selatan mencakup antara lain: (1) tidak ada lahan parkir; (2) pedagang kaki lima yang tumpah ke jalan; dan (3) minimnya

infrastruktur pasar seperti lantai rusak dan kotor, (4) problem drainase/saluran air; (5) becek dan banjir; (6) penanganan limbah/sampah pasar yang lemah; dan lain sebagainya (Gambar 2a-2c).



Gambar 2a. Situasi Lorong di Pasar Jombang



Gambar 2b. Situasi Drainase/Saluran Air di Pasar Ciputat Permai



Gambar 2c. Situasi Parkir Pasar Ciputat

Sumber: survey, 2017

Karena belum jelasnya tata kelola

pasar tradisional yang diindikasikan oleh: pertama, ketiadaan regulasi (lack of regulation). Kedua, tumpang-tindih kewenangan tentang siapa mengelola apa. Indikasi tumpang-tindih kewenangan tersebut diindikasikan oleh begitu banyaknya lembaga (dinas) yang mengurus pasar tradisional. Ketiga, banyaknya para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pasar tradisional, baik pemangku kepentingan formal maupun nonformal. Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat berdampak pada kompleksitas masalah yang dihadapi dan kesulitan pengambilan solusi kebijakan yang tepat tentang siapa aktor yang paling bertanggungjawab atas persoalan pasar tradisional. Atas dasar masalah tersebut, artikel ini berupaya mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola pasar tradisional beserta jaringannya dan menguji siapa aktor yang paling berperan dalam jaringan tersebut.

II. METODE

Data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survey dengan instrumen wawancara. Informan dipilih secara purposive dengan standar penilaian bahwa informan mengetahui dan memahami persoalan yang diteliti. Tabel 2 menggambarkan sebaran informan baik personal maupun kelembagaan.

Teknik analisis menggunakan Social Network Analysis (SNA). SNA adalah studi terhadap entitas sosial dan relasi antarentitas tersebut. Interaksi dan hubungan dapat dinyatakan dengan suatu jaringan atau graf, di mana setiap vertex (node) menyatakan suatu hubungan. Dari jaringan tersebut dapat dipelajari properti strukturnya seperti misalnya: peran, posisi, dan martabat dari setiap aktor. Dari analisis ini juga dapat diperoleh berbagai macam

bentuk subgraf seperti komunitas yang terbentuk dari sekelompok aktor. Rujukan metode ini terdapat dalam Yamaki (2017)

dan Zedan & Miller (2017). Beberapa terminologi (ukuran) dalam SNA sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.

Tabel 2.

Distribusi Jumlah Informan

| Informan | Jumlah (orang) |
|--|----------------|
| Staf Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1 |
| Staf UPT Pasar | 1 |
| Satpam Pasar Ciputat | 1 |
| Satpam Pasar Serpong | 1 |
| Petugas Pemungut Retribusi Pasar Ciputat | 1 |
| Anggota DPRD | 1 |
| Σ | 6 |

Tabel 3.

Definisi Terminologi dalam SNA

| Konsep | Definisi |
|-------------------------------|--|
| <i>Node (vertex)</i> | Unit fundamental dari sebuah jaringan. Node adalah unit stakeholder, dapat berupa (organisasi, person, dll). |
| <i>Degree centrality</i> | Derajat sentralitas dikemukakan oleh Scott (2009) berkenaan dengan konsep sosiometri dalam mengidentifikasi individu yang berperan sebagai “star” yakni individu paling populer di dalam sebuah jaringan atau individu yang menempati posisi sentral dan menjadi pusat perhatian. |
| <i>Closeness centrality</i> | Tingkat kedekatan ini menunjukkan jumlah langkah yang harus ditempuh oleh individu dalam menghubungi individu lainnya di dalam sistem. Dengan kata lain, semakin kecil derajat kedekatan yang diperoleh individu maka semakin besar kemampuan individu tersebut dalam menghubungi semua anggota di dalam jaringan. |
| <i>Betweenness centrality</i> | Scott (2009) mengemukakan bahwa tingkat kebersamaan ini dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan individu terhadap individu lainnya. Dengan kata lain, tingkat kebersamaan yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan individu terhadap individu lainnya di dalam suatu sistem. |
| <i>Eigenvector centrality</i> | Mengukur seberapa baik elemen terhubung ke elemen lain. Secara umum, elemen dengan sentralitas <i>eigenvector</i> yang tinggi adalah pemimpin jaringan, meskipun mereka mungkin tidak memiliki pengaruh lokal terkuat. |

Sumber: Zedan dan Miller, 2017; Scott, 2009; <https://kumu.io>

Persamaan matematis untuk mengetahui degree centrality sebagaimana tertulis dalam persamaan [1-2], closeness centrality pada persamaan [3], betweenness centrality pada persamaan [4], dan eigenvector centrality pada persamaan [5].

$$C_D(i) = \frac{d(i)}{n-1} \dots\dots\dots [1]$$

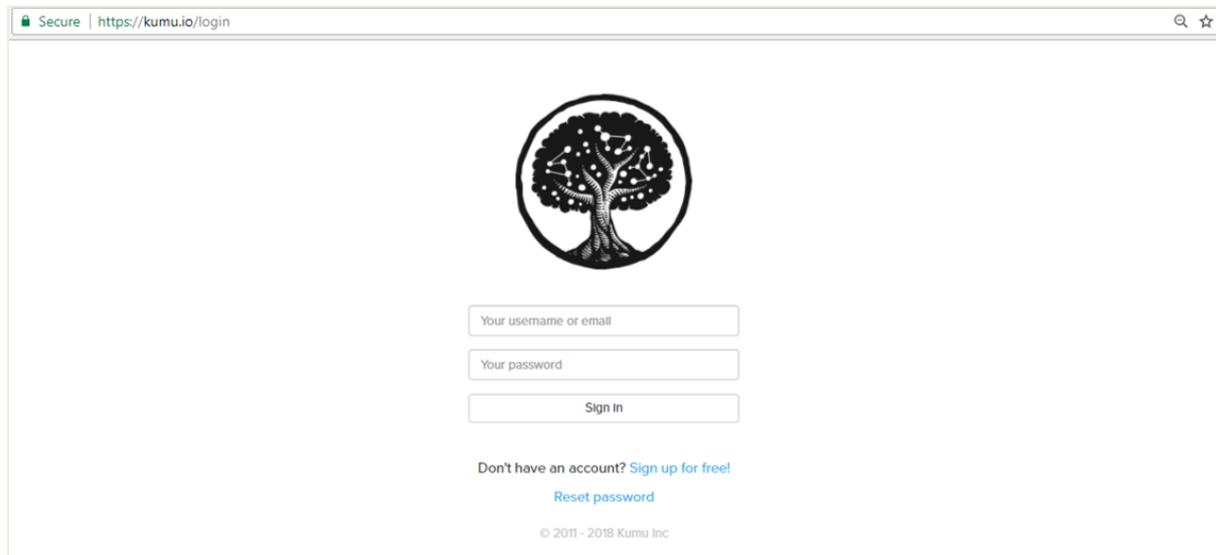
$$C'_D(i) = \frac{d_0(i)}{n-1} \dots\dots\dots [2]$$

$$C'_c(A) = \left[\frac{\sum_{j=1}^N d(A,j)}{N-1} \right]^{-1} \dots\dots\dots [3]$$

$$C_B(i) = \sum_{j < k} \frac{p_{jk}(i)}{p_{jk}} \dots\dots\dots [4]$$

$$C_i^e = \frac{1}{\lambda} \sum_{j: j \neq i} y_{i,j} c_j^e \dots\dots\dots [5]$$

Di mana $C_D(i)$ adalah degree centrality dari aktor i , $d(i)$ derajat jumlah dari node aktor, dan dinormalisasi dengan nilai maksimum $n-1$, d_0 adalah out-degree, C_c adalah jarak kedekatan, $C_B(i)$ adalah betweenness centrality, P_{jk} adalah jumlah jalur terpendek antara aktor j dan k . Data diolah secara daring pada portal <https://kumu.io>. Untuk sampai pada tahap pengolahan data, prosedur yang harus ditempuh pertama kali adalah melakukan registrasi dengan menggunakan akun surat elektronik pribadi (email). Setelah proses registrasi selesai, proses pengolahan data dapat dilakukan.



Sumber: <https://kumu.io>
Gambar 3. Aplikasi Pengolah Data SNA kumu.io

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara pertama dilakukan dengan Staf UPT Pasar pada pertengahan Oktober 2017. Setelah itu dilanjutkan dengan survey dan wawancara dengan Satpam Pasar Ciputat dan Satpam Pasar Serpong. Temuan lapangan kemudian dilakukan konfirmasi kepada Pimpinan Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada akhir

Oktober 2017. Wawancara juga dilakukan dengan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang membidangi masalah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara dan konfirmasi diperoleh data bahwa ternyata banyak aktor yang berkepentingan terhadap keberadaan pasar tradisional. Tabel di bawah ini menjelaskan aktor dan peran aktor tersebut dalam konstelasi dan dinamika pasar tradisional di Tangerang Selatan.

Tabel 4. Aktor-Aktor yang Terlibat di Pasar Tradisional

| No | Aktor | Tipe | Deskripsi |
|----|--|------------|--|
| 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Organisasi | Dinas ini adalah dinas <i>leading sector</i> yang menangani pasar di Tangerang Selatan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 5/2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan, dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 2/2013 tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. |
| 2 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman | Organisasi | Dinas ini mengurus masalah kebersihan, termasuk sampah yang dihasilkan oleh pasar tradisional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 5/2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. |
| 3 | Dinas Perhubungan | Organisasi | Wewenang dan tanggung jawab dinas ini menyangkut urusan penertiban lalu lintas, termasuk lalu lintas kendaraan di pasar tradisional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 5/2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 4 | Satpam | Person | Satpam bertanggungjawab atas keamanan di pasar. Satpam bertanggungjawab pada Kepala UPT Pasar, dan pengelola pasar [swasta]. |
| 5 | Oknum Legislatif | Person | Terdapat anggota DPRD/DPR yang menjadi pengguna kios di pasar. Kios dibeli kemudian disewakan ke pihak ketiga. Secara reguler membayar retribusi dan uang sewa kios. |
| 6 | Oknum Polisi/TNI | Person | Terdapat oknum polisi/TNI yang menjadi pengguna kios di pasar. Sama halnya dengan anggota DPRD/DPR, kios dibeli kemudian disewakan ke pihak ketiga. Secara reguler mereka membayar retribusi dan uang sewa kios. |
| 7 | Petugas Retribusi | Person | Berwenang memungut retribusi pada pengguna kios dan PKL. Melaporkan hasil pungutan kepada Kepala UPT Pasar. Berhubungan baik dengan preman, warga sekitar dan pengelola pasar. |
| 8 | Preman | Person | Eksis dalam setiap pasar. Berhubungan baik dengan pengguna kios, PKL, pemungut |

| | | | |
|----|--------------------------|------------|---|
| 9 | Pengguna Kios/Lapak | Person | retribusi dan melakukan pungutan tak resmi kepada pengguna kios dan PKL. Pengguna kios menyewa secara resmi kios yang mereka gunakan. Membayar retribusi kepada petugas pemungut retribusi. |
| 10 | Pedagang Kaki Lima (PKL) | Person | Eksis dalam setiap ruang pasar. Keberadaannya sulit dikontrol karena mereka berpindah-pindah. Membayar retribusi dan pungutan yang diambil oleh preman dan kadang membayar retribusi resmi. |
| 11 | Warga sekitar pasar | Person | Warga yang eksis di sekitar pasar. Dalam hal tertentu juga berdagang. |
| 12 | Petugas Parkir | Person | Berwenang mengurus sarana parkir, menerima pembayaran jasa parkir dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pasar dan pengelola pasar. |
| 13 | Pengelola pasar [swasta] | Organisasi | Terdapat pasar yang dikelola swasta. Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memungut retribusi dan berbagi hasil atas retribusi yang dipungut kepada kas daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. |

Sumber: wawancara, 2017

Tiga belas aktor tersebut kemudian bertemu dalam satu arena kepentingan, yaitu lahan yang terdapat di pasar. Bagi organisasi pemerintah semisal Dinas perindustrian dan Perdagangan, lahan pasar merupakan 'komoditas' penting bagi penghasil pendapatan asli daerah (*generating income*) melalui pungutan retribusi. Di saat yang sama, keberadaan pasar cukup penting bagi oknum untuk memainkan kapasitas mereka di tengah

lack of regulation dan lemahnya penegakkan aturan demi memperoleh keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi tersebut umumnya berbentuk finansial. Cara-cara yang ditempuh antara lain melakukan pungutan retribusi di luar dari ketentuan yang ada, tidak melaporkan pungutan yang telah dipungut, atau jikalau dilaporkan, nilai yang disajikan tidak sesuai dengan jumlah yang diterima.



Gambar 4. Peta Arena Kepentingan Para Aktor

Sumber: wawancara, diolah; 2017

Bagi oknum anggota legislatif dan oknum polisi/TNI, *lack of regulation* dan lemahnya penegakkan aturan dimanfaatkan untuk meraup rente lahan/kios pasar. Mereka dapat dengan mudah membeli kios kemudian disewakan kembali ke pihak ketiga. Cara ini tentu bertentangan dengan Pasal 45 UU. No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 20 PP. No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

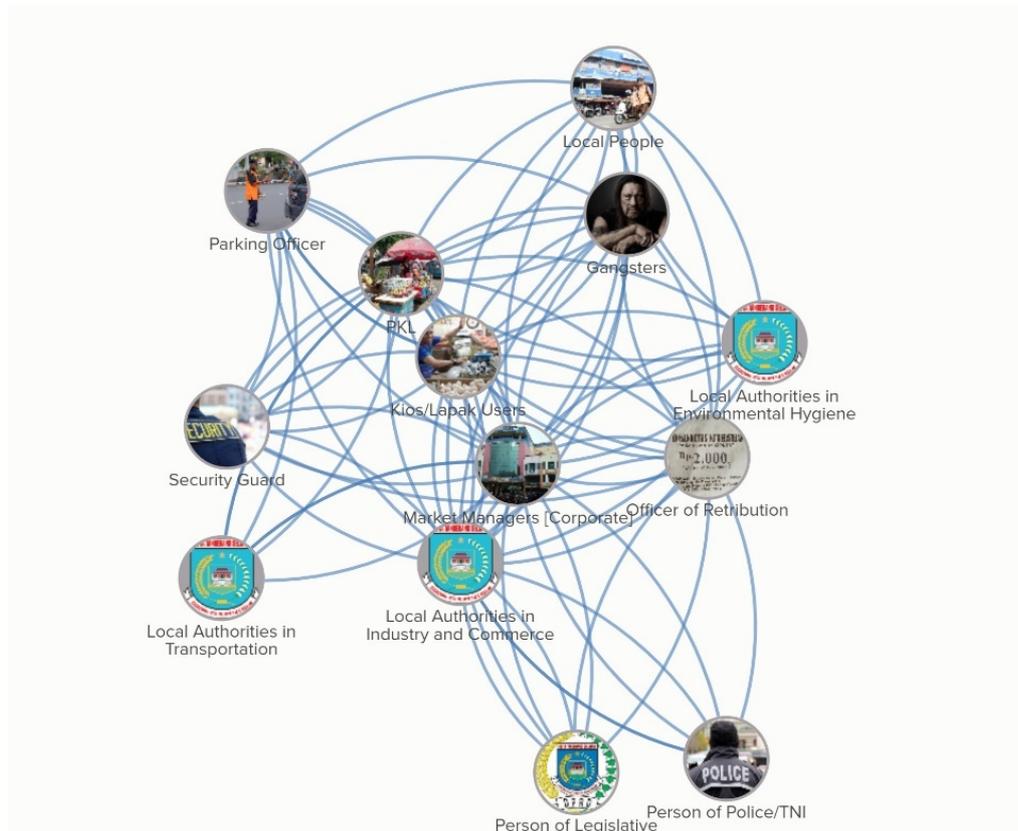
Aktor lapangan seperti petugas pemungut retribusi, satpam, pengguna kios dan PKL, warga sekitar pasar, petugas parkir juga memburu rente yang sama, yaitu lahan pasar. Pengguna kios memburu lahan kios untuk mencari keuntungan, PKL memburu lapak kosong untuk mencari pendapatan ekonomi, dan petugas pemungut retribusi melakukan pungutan sesuai jumlah kios dan lahan yang digunakan oleh pengguna dan PKL. Kesemuanya berkepentingan terhadap lahan pasar.

Yang tidak kalah penting adalah keberadaan preman (*gangsters*). Kemunculan mereka di tengah konstelasi dan dinamika pasar tampaknya lebih disebabkan desakan ekonomi mereka sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan pengangguran yang mereka alami. Relasi antara preman, pengguna kios, PKL dan warga sekitar cukup rumit digambarkan. Tetapi yang jelas, ada hubungan simbiosis-mutualistik di antara mereka. Di satu sisi, pengguna

kios/PKL merasa terbebani secara ekonomi karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan pungutan untuk preman, tetapi di sisi yang lain keberadaan preman semacam kebutuhan, terutama dari sisi perannya sebagai 'penjaga keamanan' pasar. Temuan ini serupa dengan studi yang dilakukan Jati (2012) di Yogyakarta.

Aktor lain adalah pihak korporasi swasta yang dalam hal ini diwakili oleh pengelola pasar. Menurut data yang diperoleh, dari sembilan pasar yang ada, hanya Pasar Serpong yang telah dikelola swasta. Pengelolaan ini berimplikasi pada tata kelola operasional di lapangan semisal perihal pemungutan retribusi dan sarana parkir. Karena tabiat korporasi umumnya menghasilkan profit sebesar-besarnya melalui uang sewa dan pungutan retribusi, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan hal itu adalah memberi fasilitas dan layanan terbaik bagi pengguna kios/PKL dan masyarakat konsumen yang datang ke pasar. Karena itu, hasil pengamatan terhadap pasar ini menghasilkan temuan bahwa pasar ini lebih baik dibanding kondisi pasar lain di Tangerang Selatan.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana jaringan sosial para aktor tersebut dan siapa aktor yang paling berpengaruh terhadap aktor-aktor lainnya. Hasil simulasi model SNA tergambar dalam ilustrasi peta jaringan di bawah ini.



Gambar 5. Peta Jaringan Sosial Para Aktor di Pasar Tradisional Di Kota Tangerang Selatan

Sumber: data diolah, 2017

Hasil simulasi diperoleh informasi bahwa pengelola pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah aktor yang menempati posisi sentral dalam konstelasi relasi antaraktor dalam pasar tradisional. Nilai *degree centrality* kedua aktor ini masing-masing 25 dan 19. Dari sudut pandang kelembagaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan *leading sector* yang bertanggungjawab atas pengelolaan pasar tradisional di Tangerang Selatan. Namun yang menarik justru peran pengelola pasar dalam konstelasi tersebut. Hasil simulasi model SNA menunjukkan bahwa korporasi swasta menjadi aktor penting. Temuan ini menjadi indikasi bahwa terdapat kecenderungan kelembagaan bahwa tata kelola pasar efektif dikelola korporasi. Meski demikian, mengukur efektifitas ini

menjadi isu dan urusan serta studi empirik yang lain.

Hal yang sama juga terjadi pada *closeness centrality*. Simulasi SNA menunjukkan bahwa pengelola pasar menjadi aktor utama sebagai penghubung relasi bagi aktor lainnya; yang setelahnya adalah aktor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hasil simulasi ini cukup masuk akal jika dikaitkan pada kenyataan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan-lah yang seyogyanya menjadi institusi yang bertanggungjawab dalam tata kelola pasar tradisional. Persoalan apakah pengelolaannya diserahkan kepada swasta, itu soal lain. Dalam simulasi SNA, pengelola pasar menjadi aktor utama-pertama untuk mewujudkan tata kelola pasar tradisional yang baik. Hasil pengamatan di Pasar Serpong menunjukkan, pasar ini lebih baik mutunya dibanding pasar lain, terutama

dari aspek akuntabilitas pungutan retribusi dan fasilitas pelayanan.

Tabel 5.

Degree Centrality, Closeness Centrality, Betweenness Centrality, dan Eigenvector Centrality

| Aktor | Degree Centrality | | Closeness Centrality | | Betweenness Centrality | | Eigenvector Centrality | |
|---|-------------------|------|----------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| | Nilai | Rank | Nilai | Rank | Nilai | Rank | Nilai | Rank |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 19 | 2 | 0,917 | 2 | 0,092 | 2 | 0,102 | 2 |
| Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman | 10 | 10 | 0,708 | 10 | 0,003 | 9 | 0,065 | 10 |
| Dinas Perhubungan | 7 | 11 | 0,625 | 12 | 0 | 11 | 0,048 | 11 |
| Satpam | 11 | 7 | 0,792 | 8 | 0,001 | 10 | 0,072 | 7 |
| Oknum Anggota Legislatif | 7 | 12 | 0,667 | 11 | 0 | 12 | 0,048 | 12 |
| Oknum Polisi/TNI | 5 | 13 | 0,625 | 13 | 0 | 13 | 0,042 | 13 |
| Petugas Pemungut Retribusi | 15 | 5 | 0,875 | 5 | 0,035 | 5 | 0,085 | 5 |
| Preman | 13 | 6 | 0,833 | 6 | 0,004 | 8 | 0,081 | 5 |
| Pengguna Kios/Lapak | 19 | 3 | 0,917 | 3 | 0,046 | 4 | 0,102 | 3 |
| Pedagang Kaki Lima | 19 | 4 | 0,917 | 4 | 0,068 | 3 | 0,100 | 4 |
| Warga sekitar pasar | 11 | 8 | 0,792 | 9 | 0,006 | 7 | 0,067 | 9 |
| Petugas Parkir | 11 | 9 | 0,833 | 7 | 0,010 | 6 | 0,067 | 8 |
| Pengelola pasar [swasta] | 25 | 1 | 1 | 1 | 0,193 | 1 | 0,120 | 1 |

Sumber: data diolah, 2017

Pada *betweenness centrality* juga demikian. Ukuran ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan individu terhadap individu lainnya di dalam suatu sistem. Aktor utama yang memiliki tingkat *betweenness* yang tinggi adalah pengelola pasar, disusul setelahnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Ketergantungan pengelola pasar atas aktor-aktor lainnya cukup masuk akal jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa pengelola pasar sangat tergantung pada regulasi perpasaran yang dalam hal ini *leading sector*-nya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Apalagi, infrastruktur pasar dengan segala isinya

dimiliki oleh daerah, di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi institusi yang bertanggungjawab mengurusnya.

Terakhir adalah ukuran *eigenvector centrality*. Secara umum, elemen dengan sentralitas *eigenvector* yang tinggi adalah pemimpin jaringan, meskipun mereka mungkin tidak memiliki pengaruh lokal terkuat. Hasil simulasi SNA, pengelola pasar tetap menjadi aktor utama dan terkuat dalam tata kelola pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan. Dalam model, pengelola pasar menjadi aktor yang dominan dalam mendorong tata kelola pasar tradisional. Persoalan apakah hasil dorongan itu menjadikan pasar tradisional lebih baik, tentu perlu dikaji lebih lanjut. Sebab implementasinya di lapangan akan sangat tergantung dari situasi sosial, ekonomi, politik daerah masing-masing.

Namun yang pasti nyata adalah seluruh aktor tetap penting dalam konstelasi sosial pasar tradisional. Aktor-aktor yang secara kelembagaan kurang berperan, sebaiknya tugas pokok dan fungsinya diintegrasikan ke dalam dinas yang memang bertanggungjawab dalam urusan perpasaran, sehingga perihal tentang “siapa mengelola apa” menjadi terang-benderang. Selain itu, mempertimbangkan seluruh aktor dalam proses pengambilan kebijakan penataan pasar tradisional juga penting dilakukan. Penataan pasar tradisional yang hanya mengandalkan sumber modal finansial hanya akan melahirkan pasar tradisional yang baik dalam infrastruktur tetapi keropos dalam hal suprastruktur. Karena itu, Febrianty (2013) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pasar tradisional yang modern, harus bertumpu pada empat komponen modal: *capital*, *human*, *institutional*, dan *financial*.

IV. KESIMPULAN

Dalam kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan tidak terjadi di ruang hampa udara, melainkan hasil dari proses tawar-menawar antaraktor yang sering memiliki beragam preferensi dan kepentingan. Tawar-menawar beragam antaraktor itu adalah hasil dari beragam sumber seperti keberadaan peraturan formal, normal-norma informal, kemampuan para aktor tersebut dalam memobilisasi kelompok mereka atau kontrol mereka terhadap berbagai sumberdaya yang ada.

Gambaran itu terjadi dalam dinamika dan konstelasi tata kelola pasar tradisional di Tangerang Selatan. Hasil investigasi menunjukkan, terdapat tiga belas aktor yang kesemua aktor tersebut berada dalam satu arena kepentingan, yaitu mencari rente sebesar-besarnya atas lahan pasar. Tiga belas aktor tersebut kemudian membentuk jejaring dan relasi simbiosis-mutualistik. Dalam perspektif governance, hasil pengujian dengan menggunakan SNA diperoleh informasi bahwa aktor utama-pertama yang memainkan peran secara dominan adalah pengelola pasar yang dalam hal ini adalah korporasi swasta; dan setelahnya adalah otoritas (dinas) yang bertanggungjawab atas pengelolaan pasar, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianita, E., Wijaya, A.F., Siswidiyanto, 2015. Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 5: 758-762.
- Asma, N., 2016. Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional Pa'baeng di Kota Makassar, *Government: Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan, Vol. 9, No. 2, Juli 2016: 103-110.
- Basri, M.C., et al, 2012. Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Bintoro, R.W., 2010. Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010: 360-374.
- Cambell, et al., 1991. *Governance of the American Economy*, Cambridge University Press: Cambridge.
- Febrianty, D., 2013. Model Revitalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional, *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, Vol. 5, No. 3, November 2013: 140-216.
- Handoko, A.T., 2012. Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kab. Pematang Tahun 2007-2011, *Economics Development Analysis Journal*, 1 (2) (2012): 1-7.
- Holidin, D., dan Andini, R.S., 2014. Sound Governance Analysis in the Innovation of Traditional Market Revitalization and Street Vendors Management, *International Journal of Administrative Science & Organization*, January 214, Vol. 21, Number 1: 17-26.
- Hood, C., 1990. A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, Vol. 69, No. 1: 3-19.
- Istiningtyas, D.A., 2008. Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Bogor, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/1509>, diakses 7 Januari 2018.
- Jati, W.R., 2012. Kuasa dan Kekerasan: Kelembagaan Premanisme Yogyakarta Paska Reformasi, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 2, No. 1, April 2012: 61-75.
- Kupita, W., dan Bintoro, R.W., 2012. Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012: 45-59.
- Lefwich, A., 1994. *Governance, the State and the Politics of Development, Development and Change*, Vol. 25, Issue 2, April 1994.
- Marselina, E., 2013. Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Padang, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1: 1-25.
- Martini, L.K.B., Kepramareni, P., Widyani, A.A.D., 2016. Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan Pasar Modern di Bali, *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, "Inovasi Iptek Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Unmas Denpasar, 29-30 Agustus 2016.
- Masitha, A.I., 2010. Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Pedagang, *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, Vol. 2, No. 1, April 2010: 41-55.
- Megawati, N.A., & Soejoto, A., 2016. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 4, No. 3: 1-10.
- Noor, A., Perlindungan terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern, *Economica*, Vol. IV, Edisi 12, November 2013: 107-120.

- Ostrom, E., 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institution for Collective Action*, UK: Cambridge University Press.
- Pierre, J., 1998. *Globalization and Governance*, Edward Elgar Publishing: United Kingdom.
- Pradipta, A.A.G.P., dan Wirawan, I.G.P.N., 2016. Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional dan Sumber Daya Pedagang terhadap Kinerja Pedagang Pasar di Kota Denpasar, *E-Jurnal EP*, 5 [4]: 460-479.
- Prastyawan, A., Suryono, A., Soeaidy, M.S., Muluk K., 2015. Revitalization of Traditional Market into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory, *Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 20, Issue 9, Ver IV, Sep 2015: 01-06.
- Purwanto, W., 2012. Analisa Persaingan Antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern Studi Kasus di Kawasan Ciledug Tangerang, *Jurnal MIX*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2012: 113-124.
- Putra, R. D. D., & Rudito, B. 2015. Planning Community Development Program of Limbangan Traditional Market Revitalization with Social Mapping. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 169, 143-150.
- Rhodes, R.A.W., 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity, and Accountability*, Open University Press & McGraw-Hill: UK
- Sadino & Syahbana, J.A., 2014. Pasar Tradisional Versus Pasar Modern di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta), *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 10 (2), Juni 2014: 205-217.
- Scott, J., 1992. *Social Network Analysis Theory and Application*. Newberry Park CA: Sage.
- Smadja, O.P., & Torre, A., 2017. Retail decentralization and land use regulation policies in suburban and rural communities: The case of the Ile-de-France region, *Habitat International xxx*(2017): 1-12.
- Sudarmo, 2016. The Implications of Traditional Market Development for Governance of Conflict: An Experience from Klewer Market of Surakarta, Indonesia, *Journal of Government & Politics*, Vol. 7, No. 4, November 2016: 619-639.
- Sukaatmadja, I.P.G., Yasa, N.N.K., Rahyuda, H., Widagda, I.G.A.Ngr.J., 2014. Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Kearifan Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan di Bali, *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014: 121-129.
- Suryadarma, D., Poesoro, A., Akhmadi, Budiyati, S., Rosfadhila, M., Surhayadi, A., 2010. Traditional Food Traders in Developing Countries and Competition from Supermarket: Evidence from Indonesia, *Food Policy*, 35 (2010): 79-86.
- Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiyati, S., Akhmadi, Rosfadhila, M., 2007. Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia, *SMERU Research Institute*, http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/supermarket_ind.pdf, diakses 7 Januari, 2018.
- Williamson, O.E., 1999. Public and Private Bureaucracies: A Transaction Cost Economics Perspective, *Journal of*

- Law, Economics, & Organization, Vol 15, No. 1, JLEO Bureaucracies Conference (April, 1999): 306-342.
- World Bank, 2017. Governance and The Law, World Development Report 2017, Washington DC.
- Yamaki, K., 2017. Applying Social Network Analysis to Stakeholder Analysis in Japan's Natural Resource Governance: Two Endangered Species Conservation Activity Cases, Journal of Forest Research, Vol. 22, No. 1: 83-90.
- Yandri, P., 2013. Tangerang Selatan di Tengah Dinamika Pembangunan Ekonomi Regional dan Nasional, STIEAD Press: Jakarta.
- Zedan, S., & Miller, W., 2017. Using Social Network Analysis to Identify Stakeholders' Influence on Energy Efficiency of Housing, International Journal of Engineering Business Management, Vol. 9: 1-11.